

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini memberikan hasil bahwa PDI Perjuangan tidak menjalankan regulasi kandidasi kepala daerah Kota Surakarta di tahun 2020 lalu dengan adil dan transparan. PDI Perjuangan dalam melaksanakan kandidasi kepada Gibran Rakabuming Raka dengan sifat sentralistik karena ditentukan hanya oleh preverensi pribadi Megawati Soekarnoputri. Meskipun pada dasarnya PDI Perjuangan memiliki prosedur selektoral *bottom up*, yang disebut sebagai upaya untuk terus relevan terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, faktanya kandidasi Gibran Rakabuming Raka ditetapkan berdasarkan latar belakang dinasti. Keputusan ini berdiri diatas kegagalan aspirasi PDI Perjuangan di level Kota Surakarta yang menginginkan Achmad Purnomo sebagai calon wali kota. Kandidasi Gibran Rakabuming Raka merupakan akibat dari kuatnya hubungan patronase antara PDI Perjuangan dengan Joko Widodo yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka menjadikan PDI Perjuangan memberikan keputusan yang bias akan transparansi dan keadilan. Konsistensi dukungan PDI Perjuangan kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai berdasarkan garis keturunan Ir. Soekarno, menjadikan Megawati Soekarnoputri memiliki kekuasaan dominan sehingga ketika terjadi kandidasi yang tidak transparan, anggota partai tidak dapat menolak.

Berdasarkan atas dua pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah, peneliti telah merumuskan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bentuk dominasi oligarki dalam kandidasi kepala daerah oleh PDI Perjuangan di Kota Surakarta tahun 2020, terletak pada proses dari kandidasi itu sendiri yang melibatkan seorang diri saja ketua umum partai sebagai pengambil keputusan. Ketua umum partai PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarnoputri merupakan elit sekaligus patron dari PDI Perjuangan. Dalam hal ini, Megawati Soekarnoputri sebagai sosok sentral partai sering mewakili partai dalam berhubungan dengan patron klien lainnya, sehingga dalam hal kandidasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta di tahun 2020 telah dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan Joko Widodo yaitu ayah Gibran Rakabuming Raka sebagai patron PDI Perjuangan yang telah memberikan kontribusi bagi keberhasilan PDI Perjuangan harus didukung kepentingannya meskipun harus mengorbankan kepentingan aspirasi anggota lain.
- 2) Bentuk dominasi politik dinasti dalam proses kandidasi Gibran Rakabuming Raka ini tergambar melalui adanya intervensi atau campur tangan dari dinasti yang dimiliki kandidat. Dalam hal ini yaitu mengenai keterkaitan Joko Widodo yang merupakan tokoh politisi nasional dan juga sebagai patron PDI Perjuangan, dimana Joko Widodo telah berupaya untuk melakukan lobby politik atas penyuksesan kandidasi anaknya melalui PDI Perjuangan. Selain itu, dominasi politik dinasti juga tercermin dari kuatnya pengaruh kepopuleran Joko Widodo dalam mengambil suara masyarakat terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

4.2 Saran

Berkaca pada fakta kandidasi Gibran Rakabuming Raka yang berlatar belakang dinasti serta dipengaruhi oleh faktor kepentingan patron elit partai, telah terbukti bahwa hal yang demikian memberikan luka dan kekecewaan bagi anggota PDI Perjuangan. Bukan hanya kepada yang telah digagalkan secara tidak adil, namun juga kepada seluruh anggota partai yang telah memberikan aspirasinya. Adanya jaringan patron yang berupaya bertransaksi melunasi hutang budinya dengan harga berupa dukungan kandidasi, secara luas telah turut menurunkan kualitas demokrasi.

Dengan demikian, saran yang dapat peneliti berikan pertama-tama datang kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat lebih perhatian terhadap isu-isu politik seperti dalam hal kandidasi agar dapat lebih bijaksana memperhatikan latar belakang kandidat. Saran kedua, datang untuk pemerintah negara ini, agar mengembalikan Undang-undang pelarangan praktik politik dinasti sebagai pagar mencegah maraknya kepala daerah berlatar dinasti karena praktik ini sesungguhnya penuh dengan transaksi hutang budi yang meresahkan kepentingan umum terkhusus dalam hal kesetaraan kesempatan. Saran ketiga diberikan khusus kepada partai politik untuk segera membenahi dirinya dan memenangkan kembali simpati dan masyarakat.

Mengingat bahwa penelitian ini belum mampu sepenuhnya menjelaskan bentuk dominasi oligarki dan politik dinasti PDI Perjuangan karena terbatasnya jangkauan penelitian di level DPC (kota) saja, maka peneliti menyarankan kepada peneliti di kemudian hari untuk memperluas jangkauan analisis hingga ke level DPD (Provinsi), dan DPP (pusat).